

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Utara sedang membangun tiga waduk yang akan difungsikan sebagai kolam retensi dalam rangka menghadapi datangnya musim hujan. Tiga waduk yang berlokasi di Kecamatan Cilincing ini ialah Waduk Belibis, Kesatrian, dan Rawa Malang.

Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Jakarta Utara, Adrian Mara Maulana dalam keterangannya, Jumat (24/9).

"Di Jakarta Utara ada tiga waduk yang sedang kami kerjakan. Ada Waduk Belibis, Kesatrian, dan Rawa Malang," kata Adrian.

Hingga saat ini, progres pengerjaan waduk diperkirakan sudah mencapai 50 persen. Tiga waduk ini akan menampung air hujan yang nantinya kembali dialirkan

melalui saluran air yang bermuara ke laut menggunakan mesin pompa mobile. "Waduk itu sudah bisa kami uji coba di musim hujan tahun ini. Pengerjaannya harus berjalan karena standar waduk harus ada, misalkan sheetpile dan in-out (aliran air keluar masuk). Sementara ini juga kami masih menggunakan pompa mobile di sana," tuturnya. Pemerintah Kota Jakarta Utara diketahui tengah gencar melakukan upaya-upaya pencegahan banjir saat musim hujan tiba. Salah satunya, memetakan titik genangan dengan koordinasi antar-unit pelaksana kerja daerah (UKPD), camat, lurah, pemangku kepentingan (stakeholders), dan elemen masyarakat. Kemudian, Pemkot juga mempersiapkan solusi dalam mengantisipasi genangan saat musim hujan. ● yan

Wagub DKI: Target Banjir Surut 6 Jam, Keputusan yang Bijak

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan target banjir surut dalam enam jam merupakan keputusan yang bijak. Menurut dia, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI siap menjalankan target itu.

"Angka itu angka yang saya kira cukup bijak," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/9).

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan meminta agar banjir bisa surut dalam waktu enam jam jika terjadi hujan ekstrem. Anies dan jajarannya telah membahas persiapan penanganan dampak banjir.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto me-

nyebut, perintah Anies masih sama, yakni banjir harus surut enam jam.

Riza menyebut kemampuan BPBD menyurutkan air bergantung pada debit hujan. Petugas tidak bisa menangani banjir dalam waktu cepat, misal tiga jam, jika debit hujan tinggi. "Kan tidak bisa bagi kita untuk memprediksinya. Sementara intensitas hujan semakin tahun semakin tinggi," jelas dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Sumber Daya Air, Yusmada Faisal mengatakan, untuk mencegah banjir Jakarta, saat ini sudah dianggarkan Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan dalam program normalisasi sungai dan waduk. Pembebasan lahan dilakukan di kawasan Sungai Ciliwung dan Kali Sunter. ● yan

Sejumlah Fasilitas di RPTRA Jakpus Rusak

JAKARTA (IM) - Sejumlah fasilitas di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amir Hamzah, Menteng Jakarta Pusat rusak, terutama pada area permainan, lantai tempat olah raga. Selain itu, RPTRA Borobudur, Jakpus juga dalam kondisi bocor saat musim penghujan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat, Bangun Manalu, mengakui kondisi RPTRA di Jakarta Pusat banyak yang rusak dan kurang perawatan. "Dari data petugas RPTRA yang kita himpun kondisi RPTRA tidak terawat. Mulai dari bangku, area permainan, AC, CCTV dan komponen lainnya banyak yang rusak," ucap Bangun, saat dihubungi,

Jumat (24/9).

Bangun mengatakan dilikannya anggaran ke penanganan covid-19 membuat RPTRA kekurangan biaya untuk perawatan ruang terbuka tersebut. "Kami mohon untuk pemeliharaan kondisi RPTRA. Pasalnya cukup banyak RPTRA kita yang jumlahnya 50 cukup prihatin kondisinya," jelasnya.

Senada, Lurah Pegangsaan Parsiyo mengatakan dua RPTRA di wilayahnya cukup memprihatinkan, seperti plavon, area permainan, dan sarana olah raga hingga lantai yang rusak. Ia mengatakan kekurangan anggaran dalam merawat taman tersebut. "Banyak yang rusak RPTRA di Pegangsaan. Ini sejak tidak ada anggaran karena dipangkas untuk penanganan covid-19," ungkapnya. ● yan

DKI Genjot Vaksinasi Dewasa untuk Lindungi Anak di Bawah 12 Tahun

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot vaksinasi masyarakat usia dewasa untuk melindungi kelompok anak di bawah 12 tahun dan masyarakat rentan, seperti yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Kelompok tersebut belum bisa divaksinasi Covid-19.

"Vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi upaya gotong royong untuk melindungi mereka yang belum divaksinasi karena usia atau sebagian kecil karena alasan kesehatan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia dalam seminar RS Adhyaksa di Jakarta, Jumat (24/9).

Dia menjelaskan, semakin banyak masyarakat yang menjalani vaksinasi akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat menekan tingkat penularan Covid-19 pada kelompok anak di bawah 12 tahun dan kelompok masyarakat rentan lain.

Menurut dia, saat ini ada sekitar 2,3 juta warga berdasarkan KTP DKI Jakarta yang belum terdata melakukan vaksinasi Covid-19.

Untuk itu, ia kini melakukan pengawasan di bawah koordinasi Biro Pemerin-

tahan DKI Jakarta untuk mendata cakupan vaksinasi per keluarga. Hingga saat ini, berdasarkan data corona.jakarta.go.id, cakupan vaksinasi di tingkat kelurahan sudah di atas 60 persen. Namun, realisasi itu perlu ditingkatkan menjadi lebih tinggi dari 80 persen.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan bersama dengan lembaga dan organisasi untuk mempercepat vaksinasi dengan berbagai layanan di antaranya sentra vaksinasi, mobil keliling hingga memanfaatkan tempat umum, seperti terminal dan stasiun kereta, tempat ibadah, dan sekolah. Pendaftaran vaksinasi juga dipermudah melalui layanan daring pada aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung dengan realisasi total vaksinasi dosis satu hingga Kamis kemarin sebanyak 10,3 juta orang dari sasaran 8,94 juta.

Adapun proporsi 64 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 36 persen warga KTP non DKI. Sedangkan, total dosis dua mencapai 7,51 juta orang atau 84 persen, dengan proporsi 66 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 34 persen warga KTP non-DKI. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PERUM LKBN ANTARA BERANGKATKAN TIM PELIPUTAN PON XX PAPUA

Direktur Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat (kanan) didampingi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Hemi N Prajudi (kedua kiri) memberikan buku panduan peliputan kepada Redaktur Perum LKBN Antara Widodo S Jusuf (kiri) dan Teguh Handoko (kedua kanan) saat Pelepasan Tim Liputan PON XX Papua 2021 di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (24/9). Perum LKBN Antara memberangkatkan 66 pewarta untuk meliput Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang berlangsung pada bulan Oktober mendatang.

Komisi D DPRD DKI Dorong Pemprov Agar ITF Segera Terealisasi

Kalau *Intermediate Treatment Facility* (ITF) sudah selesai dibangun di wilayah Jakarta, tentunya tumpukan sampah di Bantar Gebang bisa dikurangi. Karena itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta terus mendorong pemerintah provinsi (pemprov) agar segera merealisasikan pembangunan "Intermediate Treatment Facility" itu.

JAKARTA (IM) - Komisi D DPRD DKI Jakarta terus mendorong pemerintah provinsi (pemprov) agar segera merealisasikan pembangunan "Intermediate Treatment Facility" (ITF) sebagai alternatif dan solusi atas pengendalian

sampah di Jakarta. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh mengatakan, dorongan tersebut mengingat bahwa dalam sehari penduduk Jakarta memproduksi hingga 7.500 ton, sementara daya tampung

TPST Bantar Gebang menyisakan 10 juta ton, dari total kapasitas 49 juta ton. Namun hingga saat ini belum ada ITF yang dicanangkan Pemprov DKI terbangun atau beroperasi.

"ITF saja belum terbangun sampai sekarang. Ini bagaimana ada solusinya. Artinya tumpukan dari Bantar Gebang ini bisa dikurangi," kata Nova.

Kalau ITF sudah selesai dibangun di wilayah Jakarta tentunya di sana sudah bisa mengecil volumenya. "Kalau sekarang sudah bisa kelola di Jakarta, rencana awal ada empat ITF itu sudah tidak perlu lagi kontrak dengan Bantar Gebang," katanya.

Senada dengan Nova, anggota Komisi D DPRD DKI,

Judistira Hermawan juga mendorong agar pembangunan empat Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) atau ITF yang telah menjadi program prioritas Gubernur DKI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 itu, setidaknya dapat menampung volume sampah warga Ibu Kota yang telah terakumulasi hingga hampir delapan ribu ton per hari.

"Sampah yang kita hasilkan ini jumlahnya sangat besar, hampir 8 ribu ton per hari, dari rumah tangga, industri, perkantoran dan sebagainya, ini kan harus dikelola dengan baik, jangan sampai jadi masalah baru," kata Judistira.

Komisi D dalam kun-

juangan kerja ke TPST Bantargebang pada 29 Januari 2020 mendapatkan informasi mengenai antisipasi fungsi kelayakan TPST Bantar Gebang Bekasi saat ITF belum dilanjutkan.

Salah satunya melalui "pilot project landfill mining" yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk penambahan umur TPST Bantargebang Bekasi hingga 1,5 tahun.

Bahkan menghasilkan produk seperti tanah kompos ataupun sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Cara ini disebut bisa mengurangi tumpukan sampah dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. ● yan

Pemkab Bekasi Optimis Selesaikan Rekomendasi LHP BPK RI pada Akhir Tahun 2021

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/9).

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi optimis dapat menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada akhir tahun 2021.

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung,

Kamis (23/9).

Saat diwawancarai, Pj. Bupati Dani menjelaskan bahwa berdasarkan LHP BPK RI, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi. Namun, saat ini Pemkab Bekasi sudah hampir menuntaskan proses penindaklanjutan tersebut.

"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI, terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum sesuai dan masih ada yang belum ditindaklanjuti, namun saat ini hampir semuanya tuntas,"

jelasnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Jumat (24/9).

Dirinya menyampaikan bahwa per tanggal 31 Agustus 2021, hanya tersisa 8% rekomendasi yang belum terselesaikan oleh Pemkab Bekasi. Sehingga dirinya yakin pada akhir tahun 2021 dapat menuntaskan tindak lanjut rekomendasi tersebut. "Per 31 Agustus 2021 sudah tinggal 8% lagi, mudah-mudahan pada akhir tahun bisa diselesaikan semua," pungkasnya.

Untuk mencapainya, Ia akan mendorong Perangkat

Daerah yang belum menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut tersebut untuk dapat melakukan penyelesaian secepatnya.

"Kami akan undang lagi Perangkat Daerah yang masih punya catatan melalui Inspektorat untuk didorong penyelesaiannya secepatnya," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan beberapa strategi yang dilakukan agar tidak ada lagi rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh BPK RI, yakni dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, melakukan review laporan keuangan sebelum ditandatangani, serta evaluasi dan pembinaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Ada beberapa strategi untuk pengendalian ini, di antaranya dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, review kembali laporan keuangan sebelum ditandatangani Kepala Daerah, lalu berikutnya dapat dilakukan evaluasi dan pembinaan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAP DPD RI Edwin Pratama Putra menjelaskan bahwa

DPD RI ingin memperoleh informasi dan penjelasan terkait penyelesaian rekomendasi tindak lanjut dari masing-masing daerah agar dapat menjamin daerah tersebut dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.

"Rapat ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan penjelasan sejauh mana rekomendasi dari BPK RI telah ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah," ucapnya.

Untuk diketahui, rapat tersebut merupakan rapat dengar pendapat dengan BAP DPD RI, BPK RI, serta BPK Provinsi Jawa Barat untuk 5 pemerintah daerah, yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran yang berdasarkan catatan hasil pemeriksaan keuangannya masih ada rekomendasi tindak lanjut yang belum diselesaikan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Wakil Ketua I BAP DPD RI, dr. Asyera Respati Wundalero, Wakil Ketua II BAP DPD RI, Edwin Pratama Putra, serta perwakilan daerah terkait. ● mdl

Camat Sukatani Sebut 80 Persen Warganya Tervaksinasi Covid-19

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Camat Sukatani, Imam (kiri) saat Sinergitas Vaksinasi di Desa Banjarsari, Kamis (23/9).

SUKATANI (IM) - Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil mencapai target herd immunity, di mana 80% warganya telah divaksinasi Covid-19. Hal tersebut berhasil diraih dengan sinergitas yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Indonesia Pasti Bisa dan Peduli Anak Bangsa. Ucapan Camat Sukatani, Imam Faturohman saat diwawancarai usai kegiatan Sinergitas Vaksinasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kamis (23/9).

"Alhamdulillah kita sudah mencapai 80 persen, dan target kami bersama Muspika akhir September sebesar 90% untuk Kecamatan Sukatani dan untuk Kabupaten Bekasi 70%," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (23/9) malam.

Dirinya menambahkan, antusiasme masyarakat di Kecamatan Sukatani untuk melakukan vaksinasi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, Gerakan Indonesia Pasti Bisa

ingatkan bagi masyarakat yang sudah divaksin untuk dosis pertama agar melanjutkan vaksin dosis kedua agar kekebalan komunal bisa terbentuk," terangnya.

Selain itu, Imam mengatakan berdasarkan data vaksinasi Covid-19 tingkat Desa se Kecamatan Sukatani, untuk Desa Sukamulya, masyarakatnya telah mencapai angka 70% yang sudah divaksin, Desa Sukadarma telah mencapai 71%, Desa Sukamanah 68%, Desa Sukarukun 54%, Desa Sukahurip 92%, Sukaasih 66% dan Desa Banjarsari 95%.

Sementara itu, Gerakan Indonesia Pasti Bisa (IPB) bersama Anak Bangsa Peduli juga mendukung program vaksinasi dalam mewujudkan Desa Herd Immunity, khususnya untuk warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani.

Sementara itu, Wanda Ponika, selaku Direktur Global Human Response Gerakan Indonesia Pasti Bisa menyampaikan, IPB telah mendukung

program vaksinasi Covid-19 dalam mewujudkan Desa Herd Immunity di Kecamatan Sukatani ini.

"Indonesia Pasti Bisa juga ikut mendukung dengan menggalakkan program Desa Herd Immunity. Kami juga telah menyalurkan sebanyak 7.000 dosis vaksin Moderna untuk warga Desa Banjarsari. Dan target setiap harinya itu 1.000 warga tervaksin," ucapnya.

Sebagai bentuk apresiasi, IPB juga memberikan bantuan berupa 3 buah saluran air bersih sedalam 100 meter serta 2 fasilitas MCK untuk warga Desa Banjarsari.

Tidak hanya itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut Raffi Ahmad yang merupakan brand ambassador dari IPB. Dalam kesempatan itu, dirinya juga turut memberikan bantuan berupa 1 fasilitas MCK, kursi roda untuk penyandang disabilitas, 1 dus susu formula yang diperuntukkan untuk bayi yang lahir secara premature serta 7 buah karpet dan sarung. ● mdl